



Dewan Kecewa, dengan Pemkot

Terkait Izin Puskesmas

DENPASAR - Mulai 2016 semua puskesmas harus memiliki izin operasional untuk mengelola puskesmas secara mandiri, termasuk juga mengenai pengadaan obat dan pelayanan kesehatan. Dan, sebagai salah satu syaratnya puskesmas harus sudah terbebas dari segala izin termasuk juga izin mendirikan bangunan (IMB).

Kenyataannya, hingga saat ini, dari 11 puskesmas yang ada di Kota Denpasar ternyata semuanya belum mengantongi izin operasional. Padahal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengultimatum semua daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

► Baca **Dewan...** Hal 31



Kenapa baru terlihat persoalan ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa selama ini masyarakat dibohongi?"

AA Susruta Ngurah Putra
Anggota DPRD Denpasar

Edisi : Senin, 28 September 2015

Hal : 21



Ini Contoh Buruk dari Pemerintah

■ DEWAN...

Sambungan dari hal 21

per Maret 2016 mendatang harus sudah mengantongi semua izin untuk menjadi unit pelayanan kesehatan secara mandiri.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang anggota DPRD Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra berang dengan adanya kabar mengejutkan tersebut. Apalagi 2016 menjadi kewajiban pemerintah untuk mengurus izin operasional dan salah satu syaratnya harus puskesmas yang bersangkutan mengantongi IMB. "Kenapa baru terlihat persoalan ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa selama ini masyarakat dibohongi?" tanyanya, saat ditemui, kemarin (27/9).

Susruta mengatakan bahwa pemerintah Kota Denpasar sendiri telah lalai dalam hal pelayanan. Menurutnya, sudah kewajiban pemerintah untuk segera mengurus izin operasional maupun IMB jika ada

puskesmas yang belum mengantongi IMB.

"Kalau ternyata ada puskesmas yang belum mengantongi IMB, ini contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Memang secara aturan tidak diwajibkan gedung pemerintah untuk dipungut retribusi IMB, tetapi wajib gedung pemerintah memiliki IMB. Dan, izin operasional harus segera diurus pemerintah Kota Denpasar," tegasnya.

Kekecewaan, itu pun diungkapkan anggota DPRD Kota Denpasar Wayan Mariana Wandhira yang juga wakil DPRD Kota Denpasar. Ia menilai selama ini tidak ada inisiasi Pemerintah Kota Denpasar dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. "Apalagi ini pelayanan kesehatan yang memang merupakan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga sangat menyayangkan jika masalah izin saja sampai sekarang belum bisa diurus padahal tugas pemerintah sendiri adalah melayani. "Ini kan patut diduga

selama ini pemerintah lalai," pungkasnya.

Dikonfirmasi kembali, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Luh Sri Armini mengatakan bahwa seluruh puskesmas di Denpasar sudah mengantongi IMB. "Kalau IMB sudah ada di 11 puskesmas yang ada di Kota Denpasar. Untuk izin operasional di Denpasar sudah menyiapkan. Karena tahun 2016 diharapkan sudah ada izin operasional," jelasnya.

Menurut Armini, sebelum terbitnya Permenkes 75/2014, maupun terbitnya Permenkes 19/2014, puskesmas cukup didaftarkan di Kemenkes RI dan diberikan tanda registrasi puskesmas. "Biasanya setelah dapat tanda registrasi, puskesmas sudah bisa beroperasi di seluruh Indonesia. Bukan di Denpasar saja," jelasnya singkat. Terkait izin operasional sendiri dalam Permenkes 75/2014 dijabarkan dalam pasal 26-28 Bab V tentang Perizinan dan Registrasi. (hen/yes)



Doking Roro

Bengkak jadi Rp 2 M

Hari Ini Diberangkatkan Menuju Surabaya

SEMARAPURA - Kapal Motor Penumpang (KMP) Nusa Jaya Abadi atau Roro akan melakukan ngedok. Doking akan dilakukan di Surabaya. Hanya saja yang cukup mencegangkan karena biaya doking yang mengalami pembengkakan cukup besar. Yakni, mencapai Rp 2,01 miliar. Ini mengalami kenaikan cukup besar dari tahun lalu yang besarnya sekitar Rp 1 miliar.

Menurut Kepala Dinas

Perhubungan dan Informasi (Kadishubinfo) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung Nengah Sukasta, pembengkakan ini terjadi karena adanya penambahan item pekerjaan. "Biasa kapal sudah tua (Kapal Roro, Red) biaya perawatannya cukup mahal," ujarnya. Sementara doking akan dilakukan di Surabaya oleh PT Yoshinori. Perusahaan ini merupakan pemenang tender dan juga merupakan pemenang tender tahun lalu.

Roro akan bertolak ke Surabaya hari ini. Doking akan dilakukan sampai 7 November mendatang. Selama tidak ada kapal Roro, penyeberangan

Biasa kapal sudah tua (Kapal Roro, Red) biaya perawatannya cukup mahal."

NENGAH SUKASTA

Kadishubinfo Pemkab Klungkung

kembali akan dilayani penyeberangan tradisional. Karena Pemkab Klungkung tidak menyiapkan kapal pengganti untuk roro selama doking. Sebelumnya memang sempat ada kapal Inerie yang beroperasi melayani Nusa Penida-Padang Bai. Namun sekarang ini sudah

tidak ada lagi.

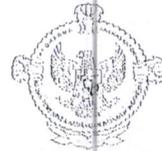
Untuk itu, Sukasta mengaku sudah melakukan sosialisasi dan meminta masyarakat untuk kembali ke penyeberangan tradisional yang ada. Sejauh ini diakui tidak ada kendala yang berarti terkait penyeberangan ke Nusa Penida selama Roro melakoni doking.

Sementara itu untuk menghindari penumpukan angkutan penumpang dari Padang Bai-Nusa Penida, Roro sempat melayani *extra trip* dari 25 sampai 27 September kemarin. Hal ini diakui Kabid Angkutan Dishubminfo I Dewa Made Sutarta. Doking sendiri akan dilaksanakan selama 40 hari.

Sementara itu sekalipun kapal pengganti tidak ada, namun kapal khusus pengangkut bahan bakar minyak (BBM) untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Nusa Penida tetap ada. Kepala UPT Penyeberangan Nusa Penida I Dewa Gede Agus Swama Hendra mengatakan, dokingnya Roro tidak akan mengganggu penyeberangan ke Nusa Penida. Terlebih sekarang ini penyeberangan ke Nusa Penida ada dari berbagai jenis, seperti *boat* cepat dan perahu tradisional. Selama doking dilakukan tidak ada pelayanan penyeberangan dengan Roro. (**tra/djo**)

Edisi : Senin, 28 September 2015

Hal : 8



Terminal Terbengkalai, Bagaimana Nasibnya Kini?

Jadi Pasar, Masih

Sisakan Utang

EKSISTENSI DAN MASALAH TERMINAL ANGKUTAN DARAT DI BALI

Kondisi Umum: Baik terminal induk maupun terminal sub kini sepi karena minimnya penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum.

Penyebab: Kepemilikan kendaraan pribadi baik mobil dan motor kian tak terkendali. Ini juga pemicu kemacetan di sejumlah titik padat lalu lintas.

Dampak:

- Banyak terminal beralih fungsi menjadi Pasar Tumpah dan Pasar Senggol
- Pungutan retribusi di stop lantaran tak ada kendaraan umum masuk.

Tawaran Solusi:

- Menunggu efektivitas moda transportasi masal Trans Sarbagita menyebar ke seluruh Bali.
- Mendorong pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur terminal dan fasilitasnya.
- Perlu koneksi trayek yang jelas dan efektif menuju terminal induk.
- Perlu peremajaan moda transportasi masal dengan fasilitas berkelas.
- Menggandeng Pasar Tradisional untuk tingkatkan layanan arus orang dan barang.



GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

Pengelolaan terminal di Bali rupanya tak sebanding dengan cost yang digelontor membangun sarana transportasi masal ini. Berat di ongkos, hasilnya sangat minim. Bagaimana nasibnya kini?

FAKTA menunjukkan, sejumlah terminal di Bali kondisinya kini terbengkalai. Lengah dan tak terawat. Tak berfungsi sebagaimana mestinya ■

► *Baca Jadi... Hal 31*

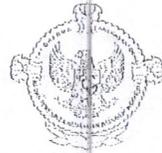
Kendaraan Pribadi Tak Terkendali, Pemerintah Tekor

Baca di Halaman 22



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

BUKAN DISULAP: Terminal Kereneng yang kini dipakai tempat berjualan pedagang musiman karena angkot sudah tak laku.



Kredit Kendaraan Mudah, Angkot Ditinggal

■ JADI...

Sambungan dari hal 21

Kendaraan umum lebih banyak ngetem di pinggir jalan raya menunggu penumpang dan ogah masuk terminal. Bahkan terminal terbesar pun nasibnya merana. Akibatnya, terminal sepi dan tak dapat memungut retribusi untuk kas daerah.

Seperti terminal di Kabupaten Buleleng. Kini terminal sudah mati suri. Beberapa sudah beralih fungsi. Tata kelolanya pun tak maksimal. Ada enam terminal yang dikelola Dinas Perhubungan Buleleng, dari sebelumnya tujuh terminal. Yakni, Terminal Banyuasri dan Terminal Seririt yang dibangun tahun 1970, Terminal Penaruhan yang dibangun tahun 1991, Terminal Sukasada yang dibangun tahun 1993, dan terakhir Terminal Cargo yang dibangun pada tahun 2002.

Belasan tahun berlalu, kini terminal rata-rata sudah mati suri. Tak lagi menjadi urat nadi transportasi warga di Singaraja. Terminal Sukasada misalnya. Tak banyak angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang beroperasi. Jangankan AKDP, angkutan kota pun jarang. Pada masa

jayanya, terminal ini menjadi penghubung utama transportasi dari Singaraja ke Denpasar.

Begitu juga dengan Terminal Banyuasri serta Terminal Seririt. Terminal Seririt kini sudah beralih fungsi. Sejak Pasar Seririt terbakar setahun silam, Terminal Seririt kini menjadi pasar darurat. Sementara Terminal Banyuasri tiap malam dijadikan pasar tumpah.

Ada pula Terminal Kampung Tinggi yang sudah lama tak lagi beroperasi. Kini asetnya sudah beralih fungsi menjadi pasar tumpah. Terminal Kampung Tinggi tak lagi dikelola Dinas Perhubungan Buleleng. Aset terminal itu sudah beralih ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buleleng, dan kini jadi pasar senggol.

Kepala Dinas Perhubungan Buleleng, Gede Gunawan AP pun tak menampik bahwa pengelolaan terminal Kampung Tinggi kini telah beralih. Terminal seluas 1.350 meter persegi itu telah diserahkan pada 15 Juli 2014 lalu kepada sekretariat daerah.

Menurut Gunawan, tingginya pengguna angkutan pribadi, menyebabkan angkutan umum kehilangan pamornya. "Banyaknya kepemilikan sepeda motor dan kendaraan pribadi,

itu berpengaruh besar pada pemanfaatan moda transportasi angkutan penumpang umum," kata Gunawan yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/9).

Meski begitu, Dinas Perhubungan Buleleng masih optimistis terminal bisa menjadi salah satu tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD) di Buleleng. Sejak tahun 2011 lalu, realisasi PAD dari terminal selalu diatas target.

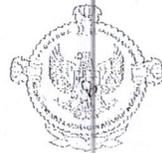
Kedepannya, Gunawan mengatakan, pemerintah masih melakukan inventarisasi kembali terminal di Buleleng. Lantaran dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004, beberapa aset terminal harus beralih fungsi. "Ada beberapa yang harus kami limpahkan, seperti terminal Sukasada dan Terminal Banyuasri. Itu masih kami koordinasikan secara intens ke provinsi," kata Gunawan.

Di Karangasem juga tak kalah memprihatinkan. Semakin berkembangnya transportasi, mengakibatkan angkutan umum, menjadi tersingkir. Ada dua terminal yang dikelola pemerintah. Yakni terminal angkutan pedesaan di sebelah barat Pasar Amlapura Timur, serta terminal Subagan. Keduanya terminal tipe C.

Meski tak merinci sejak kapan dua terminal itu sepi penumpang, Kepala Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Karangasem, I Wayan Sutapa, menegaskan, masyarakat mulai ogah baik bus, atau angkutan pedesaan, setelah semakin mudahnya syarat pembelian kendaraan pribadi. Misalnya, bisa dicicil, juga dengan uang muka atau DP (*down payment*) yang relatif murah.

Meski sepi penumpang, Pemkab Karangasem, tetap merawat dua terminal itu. Terbukti, pemerintah mengucurkan anggaran Rp 180 juta, untuk biaya rehab Terminal Subagan, tahun ini. Pemerintah berkomitmen mempertahankan Terminal Subagan, lantaran ada wacana, moda transportasi Sarbagita, yang saat ini sudah menyasar Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar, bakal merembet ke Karangasem, tahun 2017, mendatang. "Sekarang sudah mulai masuk Gianyar. Tahun depan Klungkung, lanjut Karangasem. Kalau itu jadi, kan bisa pakai Terminal Subagan," sebut Sutapa.

Dia menyebutkan, setiap hari rata-rata empat armada bus, masuk ke Terminal Subagan itu. "Mulai masuk terminal sekitar



pukul 04.00, pukul 09.00 sudah sepi, bagaimana mau dapat banyak," tegas mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, itu.

Selain sepi penumpang, ternyata Terminal Subagan, yang dibangun di lahan sekitar 2 hektare tahun 2001, itu masih menyisakan utang. Besarannya mencapai Rp 525 juta. Kata Sutapa, saat pembangunan terminal yang menghabiskan sekitar Rp 3 miliar, uangnya merupakan hasil pinjaman BUIP (*Bali Urban Infrastructure Project*). "Iya, terminal itu masih *ngutang*. Bagian Keuangan membayar rp 25 juta per tahun," pungkas Sutapa.

Di Kabupaten Tabanan terdapat tiga terminal. Yakni Terminal Kediri, Terminal Tuakilang, dan Terminal Pesiapan. Gedung kantor terminal Kediri dibangun pada tahun 1999, gedung kantor terminal Tuakilang dibangun tahun 2000, dan Terminal Pesiapan asetnya adalah milik Pemerintah Provinsi Bali.

Menurutnya, adanya pasar di terminal bukanlah suatu masalah. Malahan, konsep terminal modern seperti di Negara-negara maju adalah terminal yg memiliki lebih dari satu fungsi alias tidak hanya berfungsi sebagai terminal. "Contohnya terminal dengan apartemen dan

mal seperti di negara maju dan Blok M di Jakarta. Hal tersebut biasa disebut *Mix Land Use* dimana fungsi terminal malah akan semakin maksimal," terang Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan Tabanan, I Gusti Bagus Satriyadi.

Yang menjadi masalah adalah apabila fungsi terminalnya hilang dan berubah menjadi fungsi lain contohnya pasar. "Oleh sebab itulah fungsi terminal harus tetap ada dan dijaga," lanjutnya.

Satriyadi menuturkan jika fungsi terminal yang berubah menjadi pasar dikarenakan banyak hal. Mulai dari minimnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, mudah dan murahny mendapatk kendaraan pribadi, perencanaan pembangunan (perubahan *land use*) yang tidak memperhatikan aspek transportasi yang tidak bisa dipisahkan dari *land use* itu sendiri, hingga ke kondisi sosial, ekonomi dan budaya menjadi penyebab menurun hingga berubahnya fungsi terminal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, I Made Agus Hartawiguna menambahkan, terminal di Tabanan yang berfungsi sebagai pasar adalah di terminal Pesiapan. Menurutnya

belum optimalnya operasional terminal menjadi Salah satu faktor terminal juga dijadikan pasar. "Selain itu juga untuk memberdayakan perekonomian masyarakat," imbuhnya.

Di kabupaten Bangli misalnya yang hanya memiliki satu terminal juga tidak beroperasi dengan baik. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli yakni Gede Artha mengakui terminal di Bangli sedang terbengkalai kegunaannya. Akibat hal tersebut, beberapa pedagang memanfaatkan sebagai tempat untuk menjajakar barang jualannya. "Saat ini dijadikan tempat berjualan, karena paar tempat mereka berjualan masih dalam tahap perbaikan," lanjutnya.

Sedang Jembrana saat ini memiliki tiga unit terminal. Terminal Negara, Terminal Gilimanuk dan Terminal Kargo. Terminal Kota Negara merupakan yang tertua dari ketiga terminal tersebut. Menurut Kepala Dinas Perhububngan, Komunikasi dan Informatika (Hubkominfo) Jembrana, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi. Dari ketiga terminal tersebut hanya Terminal Gilimanuk dan Terminal Kargo yang dikelola sesuai peruntukannya. (**eka prasetya/kadek mertawan/zulfika rahman/donatus openg/rid**)

Edisi : Senin, 28 Spt 2015

Hal. : 31